

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Di dalam pembanding tersebut berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salah satu sumber penemuan masalah baru yang perlu diteliti. Melalui penelitian-penelitian yang beragam, objek yang diteliti akan dapat teridentifikasi segala aspeknya. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan referensi dari penelitian terdahulu yang telah diringkas untuk mendapatkan gambaran umum isi penelitian dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Desi Elviana (Skripsi, 2017)

Penelitian terdahulu yang pertama dikutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh Desi Elviana pada tahun 2017 dari Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara Departemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Dampak Sosial Program *Campus Social Responsibility* di Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Ada pun aspek yang dibahas antara lain dampak sosial program *Campus Social Responsibility* terhadap masyarakat, orang tua, dan adik asuh menggunakan analisis nilai-nilai, sikap, pola perilaku, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Campus Social Responsibility* di Kecamatan Semampir Kota

Surabaya berdampak sosial yang positif dengan perubahan nilai-nilai yang ditunjukkan dengan kondisi jika dahulu sangat negatif tidak memikirkan sekolah namun saat ini berubah menjadi lebih positif, perubahan sikap juga ditandai dengan menunjukkan sikap lebih peduli akan pendidikan, perubahan pola perilaku ditunjukkan dengan rasa simpati lebih tinggi setelah adanya program ini, sedangkan budaya tidak mengalami perubahan karena budaya yang dipegang di wilayah tersebut masih kuat dan belum bisa berubah.

2. Hasil Penelitian Nurhidayat Siam (Skripsi, 2021)

Penelitian terdahulu yang kedua dikutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhidayat Siam pada tahun 2021 dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Dampak Pembangunan Jembatan Ngujang 2 pada Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun aspek yang dibahas adalah dampak sosial, dampak ekonomi, dan strategi dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan ke arah positif dalam segi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Bukur melalui pengembangan usaha perdagangan masyarakat yang diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah masyarakat dengan mata pencaharian jasa penyeberangan perahu tambangan kehilangan pekerjaan. Sementara hasil upaya pencegahan dampak negatif dan

pengoptimalan dampak positif hanya dalam tahap perencanaan yang menyebabkan belum adanya perubahan yang lebih baik.

3. Hasil Penelitian Yunida Handayani (Skripsi, 2023)

Penelitian terdahulu yang ketiga dikutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yunida Handayani pada tahun 2023 dari Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan judul “Dampak Sosial Pembangunan Kolam Retensi di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Jawa Barat”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik penarikan data menggunakan *simple random sampling* dan teknik pengumpulan data dengan angket, observasi, dan studi dokumentasi. Ada pun aspek yang dibahas antara lain karakteristik responden, cara hidup, budaya, dan komunitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kolam retensi di Kelurahan Cimincrang telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan ruang terbuka untuk bermain dan berolahraga. Sarana dan prasarana bidang religi, wisata dan perdagangannya juga mengalami peningkatan sehingga terdapat peluang usaha yang bervariasi. Akan tetapi, pembangunan ini juga berdampak terhadap menurunnya intensitas kegiatan bersama, hambatan dalam mengakses sumber makanan, tempat kerja, sekolah, dan pelayanan umum. Selain itu, pembangunan ini juga membuat stabilitas keamanan masyarakat terganggu. Upaya dalam meminimalisir dampak negatif yang ada, penelitian ini mengusulkan sebuah program Forum Diskusi

Masyarakat (FDM) Kawasan Pembangunan Kolam Retensi Masjid Al-Jabbar di Kelurahan Cimincrang.

4. Hasil Penelitian Almas Zerlina Benita (Skripsi, 2023)

Penelitian terdahulu yang keempat dikutip dari penelitian yang telah dilakukan oleh Almas Zerlina Benita pada tahun 2023 dari Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Dampak Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix method* yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan angket/kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan dua cara yaitu, kuantitatif meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linear sederhana, dan uji korelasi, sementara kualitatif menggunakan analisis deskriptif yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat serta perkembangan apa saja yang terjadi di pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Besuki. Sebanyak 87,5% responden menjawab dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) menimbulkan banyak dampak positif. Di samping itu, muncul penambahan

infrastruktur sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, jumlah ketersediaan tenaga kerja, jumlah tenaga pendidik, dan *income* pendapatan yang menyebabkan peningkatan produktivitas perekonomian di wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Desi Elviana	Dampak Sosial Program <i>Campus Social Responsibility</i> di Kecamatan Semampir Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas konsep dampak sosial terhadap suatu kondisi.</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek yang menjadi rumusan masalah penelitian terdahulu adalah nilai-nilai, sikap, pola perilaku, dan budaya. Sementara aspek yang digali peneliti adalah hubungan sosial yang terdiri dari jaringan sosial, kepercayaan, dan penerimaan keberagaman.</li> <li>2. Penelitian terdahulu meneliti dampak sosial sebuah program sementara peneliti meneliti dampak sosial dari adanya pembangunan infrastruktur.</li> </ol>
2.	Nurhidayatus Siam	Dampak Pembangunan Jembatan Ngujang 2 pada Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas konsep dampak dari adanya perubahan sosial berupa pembangunan.</li> <li>2. Lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung.</li> <li>3. Lingkup penelitian di desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek yang digali pada penelitian terdahulu adalah dampak sosial, dampak ekonomi, dan strategi dampak. Sementara aspek yang digali peneliti adalah fokus pada dampak sosial.</li> </ol>
3.	Yunida Handayani	Dampak Sosial Pembangunan Kolam Retensi di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas konsep dampak sosial terhadap adanya pembangunan</li> <li>2. Lingkup penelitian di kelurahan/desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek yang digali penelitian terdahulu adalah aspek perubahan dari pendapat Armour yaitu karakteristik responden, cara hidup, budaya, dan komunitas masyarakat. Sementara peneliti akan menggali aspek dari pendapat yang sama namun fokus pada aspek masyarakat atau komunitas yang di dalamnya meliputi struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, estetika, sarana dan prasarana. Kemudian diturunkan lagi dari kohesi sosial di dalamnya terdapat dimensi</li> </ol>

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
				<p>hubungan sosial yang terdiri dari jaringan sosial, kepercayaan, dan penerimaan keberagaman.</p> <p>2. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Sementara peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>
4.	Almas Zerlina Benita	Analisis Dampak Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)	1. Membahas konsep dampak dari adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan	<p>1. Pada penelitian terdahulu membahas tingkat dampak positif pembangunan JLS terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Besuki dan perkembangan apa saja yang terjadi. Sementara peneliti akan menggali secara mendalam mengenai dampak sosial pembangunan infrastruktur terhadap hubungan sosial masyarakat baik segi positif maupun negatifnya.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian <i>mix method</i> sementara peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>

## 2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

### 2.2.1 Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan kondisi yang pasti dialami oleh setiap manusia baik perubahan sosial di dalam diri manusia itu sendiri maupun di luar dirinya. Ada beberapa pendapat ahli sosiologi yang dikutip dari Saebani (2016) mengenai definisi perubahan sosial, di antaranya sebagai berikut.

1. Emile Durkheim (1967), perubahan sosial adalah hasil dari faktor ekologis dan demografis yang mengubah masyarakat tradisional dengan ikatan solidaritas mekanis menjadi masyarakat modern dengan ikatan solidaritas organis.
2. William F. Ogburn (1987), perubahan sosial adalah peristiwa pergeseran nilai dan norma di masyarakat dalam unsur kebudayaan material dan inmaterial yang saling memengaruhi satu sama lain.
3. Selo Soemardjan (1989), perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial di dalamnya.

4. Robert H. Laurer (1993), perubahan sosial adalah perubahan fenomena sosial sepanjang tingkat kehidupan manusia dari tingkat individu sampai tingkat komunal.
5. Max Weber (1994), perubahan sosial adalah perubahan kondisi di masyarakat akibat ketidaksesuaian unsur nilai dan norma sosial yang telah lama dianut.

Berdasarkan beberapa definisi perubahan sosial dari ahli sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah kondisi pergeseran masyarakat yang disebabkan oleh faktor ekologis, demografis, dan kebudayaan yang mempengaruhi keseimbangan sistem sosial. Pendapat Karl Manheim yang dikutip dari Saebani (2016: 18) menyebutkan, *“Changing community is not determined by a set of unshakable commands, but is engaged in a permanent search for new norms to express change experiences. The content of conscience is accordingly not determined by explicit and rule but is continuously shaping itself a new”*. Artinya masyarakat berubah bukan karena sebuah perintah, namun mereka mencari norma baru untuk menyesuaikan pengalaman perubahan. Oleh karena itu hati nurani manusia tidak ditentukan secara pasti tetapi terus membentuk diri untuk menjadi sesuatu yang baru. Karl Manheim menambahkan perubahan sosial sama dengan terjadinya perubahan norma sosial yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial seperti nilai, sikap sosial, dan pola perilaku kelompok masyarakat. Willbert Moore dalam Saebani (2016) memberikan pandangannya bahwa perubahan sosial merupakan perubahan sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Semua perubahan di dalam struktur masyarakat merupakan perubahan sosial.

### 2.2.1.1 Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan mempengaruhi unsur-unsur keseimbangan masyarakat seperti geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Berdasarkan Saebani (2016) terdapat empat teori terjadinya perubahan sosial di antaranya sebagai berikut.

#### 1. Teori Evolusi (*Revolution Theory*)

Teori ini berasumsi bahwa perubahan memerlukan proses yang cukup panjang melalui tahapan tertentu. Para tokoh teori evolusi mengidentifikasi kehidupan kebudayaan manusia sesuai dengan pola dari terendah sampai ke yang lebih tinggi. Ini dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan yang berdampak pada pola pikir dan pola tingkah laku manusia. Teori evolusi dikategorikan lagi menjadi tiga yaitu *Unlinear Theories of Evolution* (manusia, masyarakat, dan kebudayaan pasti mengalami perubahan menuju kemajuan), *Universal Theories of Evolution* (perkembangan tidak melalui tahap-tahap melainkan kebudayaan secara alami berevolusi), dan *Multilined Theories of Evolution* (perubahan melalui tahap-tahap tertentu).

#### 2. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori konflik berasumsi bahwa perubahan sosial hanya akan terjadi ketika ada konflik. Teori ini bermula dari konflik antara kelas pemilik modal dan kelas yang tertindas sehingga menimbulkan perubahan sosial. Oleh karena itu, konflik sosial dan perubahan sosial melekat di dalam masyarakat. Tokoh teori ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Pandangan teori konflik secara terperinci adalah sebagai berikut:



- a. Masyarakat selalu berubah.
  - b. Setiap komponen masyarakat memberikan kontribusi perubahan.
  - c. Setiap masyarakat selalu dalam ketegangan dan konflik.
  - d. Kestabilan sosial bergantung pada tekanan golongan satu dan lainnya.
3. Teori Fungsionalis (*Fungsionalist Theory*)

Teori fungsionalis berasumsi bahwa perubahan fungsional akan diterima masyarakat, ketika perubahan disfungsional maka akan ditolak oleh masyarakat. Perubahan sosial meliputi hubungan antara unsur kebudayaan. Ada unsur kebudayaan yang dapat berubah dengan cepat dan ada yang lambat atau bahkan tidak dapat mengikuti yang menyebabkan ketertinggalan. Kondisi ini disebut dengan kesenjangan sosial (*cultural lag*). Dari kesenjangan sosial dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain, salah satunya kecemburuan sosial. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecemburuan sosial dapat diartikan suatu kondisi munculnya perasaan atau sikap yang kurang senang dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kecemburuan sosial akibat kesenjangan sosial bisa disebabkan oleh dua sisi. Sisi pertama disebabkan oleh prasangka merupakan sikap perasaan seseorang terhadap golongan manusia tertentu. Sisi kedua disebabkan perlakuan yang diterima oleh seseorang yang dibeda-bedakan atau terjadi pembedaan terhadap kelompok masyarakat lainnya ketika mengakses sesuatu. Tokoh teori fungsionalis adalah William Ogburn. Pandangan teori fungsionalis secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat relatif stabil.
  - b. Kestabilan masyarakat ditunjang oleh setiap komponen di masyarakat.
  - c. Masyarakat relatif terintegrasi.
  - d. Kestabilan sosial bergantung pada kesepakatan bersama anggota kelompok masyarakat.
4. Teori Siklus (*Cyclical Theory*)

Teori siklus berasumsi bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan karena terdapat perputaran atau siklus yang pasti diikutinya. Kemunduran dan kemajuan kebudayaan merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Beberapa teori siklus antara lain Teori Oswald Spengler (kebudayaan seperti siklus hidup makhluk hidup yaitu lahir, tumbuh kuat, melemah, dan akhirnya mati), Teori Pitirim A. Sorokin (peradaban melalui siklus tiga sistem kebudayaan yaitu kebudayaan ideasional yang didasari pada nilai serta kepercayaan supranatural, kebudayaan idealistis yang menggabungkan supranatural dan rasionalitas berdasarkan fakta sehingga membentuk masyarakat ideal, dan kebudayaan sensasi di mana sensasi menjadi ukuran kenyataan dan tujuan hidup), dan Teori Arnold Toynbee (peradaban berada pada siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian).

### **2.2.2 Dampak**

Wiryohandoyo dalam Lubis & Firmansyah (2019) mengartikan dampak perubahan sosial sebagai bentuk dari peradaban manusia sepanjang kehidupannya akibat dari perubahan alam, biologis, dan fisik. Menurut Afrizal dalam ButarButar

& Rahayu (2023), dampak pembangunan berarti akibat yang ditimbulkan dari pembangunan yang dibagi menjadi:

1. Dampak positif, dianggap baik oleh penyelenggara maupun orang lain yang dipengaruhi oleh pembangunan.
2. Dampak negatif, dianggap tidak baik oleh penyelenggara maupun orang lain yang dipengaruhi oleh pembangunan.
3. Dampak yang disadari (*intended consequences*), direncanakan oleh penyelenggara pembangunan sehingga dampak yang ditimbulkan diketahui dan disadari akan terjadi. Tergolong ke dalam dampak positif.
4. Dampak yang tidak disadari (*unintended consequences*), tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan sehingga dampak yang ditimbulkan tidak diketahui dan tidak disadari akan terjadi. Tergolong ke dalam dampak negatif.

Berdasarkan Ogburn (1923) mengenai teori fungsionalis bahwa teori ini mencoba menggali apa yang menjadi penerimaan dan penolakan masyarakat dalam menentukan perubahan bersifat fungsional atau disfungsional terhadap mereka. William Fielding Ogburn menambahkan bahwa perubahan sosial digambarkan dalam istilah psikologis, seperti sifat bersosialisasi, pertemanan, pergaulan, respons terhadap rangsangan dan kesadaran. Masyarakat akan menerima perubahan apabila memberikan pengaruh fungsional terhadap mereka, sementara apabila perubahan menunjukkan pengaruh yang disfungsional maka perubahan tersebut akan ditolak. Sehingga konsep fungsional merujuk pada dampak positif sementara disfungsional merujuk pada dampak negatif.

### 2.2.3 Pembangunan

Pembangunan berkaitan dengan perubahan sosial. Definisi pembangunan menurut ahli antara lain:

1. Pembangunan dalam pengertian modern menyiratkan perubahan sosial yang disengaja sesuai dengan tujuan masyarakat (Bjorn Hettne dalam Kurniullah, et al., 2021: 4).
2. Pembangunan mengacu pada solusi untuk kemajuan dan perkembangan (Cowen & Shenton dalam Kurniullah, et al., 2021: 5).
3. Pembangunan didefinisikan sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan institusi nasional, serta pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan absolut (Todaro & Smith dalam Kurniullah, et al., 2021: 7).
4. Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis (Easton dalam Nurcholis, et al., 2016).
5. Pembangunan adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial (Johan Galtung dalam Nurcholis, et al., 2016).
6. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan

peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya (Bintoro Tjokroamidjojo dalam Nurcholis, et al., 2016).

7. Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah dalam Nurcholis, et al., 2016).

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perencanaan (*social plan*) menuju perubahan sosial yang disengaja untuk kemajuan dan perkembangan multidimensi sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses tanpa akhir untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kurniullah, et al. (2021) bahwa pembangunan terdiri dari dua unsur yaitu unsur materi yang ingin dihasilkan dan dikontribusikan serta unsur manusia sebagai pelaku yang melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 BAB III-BAB XII, menyebutkan sembilan bidang pembangunan nasional, yaitu pembangunan hukum, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan agama, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan budaya, pembangunan daerah, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pembangunan pertahanan dan keamanan. Fokus penelitian ini adalah pembangunan sosial yang berarti pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial adalah pembangunan manusia dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya. Menurut Sukoco (2021) yang dikatakan berfungsi secara sosial apabila objek mampu melaksanakan peranan sosialnya (status sosial, interaksional, tuntutan atau harapan, tingkah laku, dan situasi sosial), serta mampu memenuhi kebutuhannya, mampu memecahkan masalahnya.

#### **2.2.4 Hubungan Sosial**

Terjadinya perubahan sosial disebabkan karena beberapa aspek, menurut Armour dalam Roanuddin (2016) aspek perubahan terdiri dari cara hidup, budaya, dan komunitas. Komunitas merujuk pada istilah masyarakat. Aspek komunitas dibagi lagi menjadi beberapa unsur pembentuk antara lain struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, estetika, serta sarana prasarana.

Menurut European Committee for Social Cohesion dalam Norton & Haan (2013: 11) *“Social cohesion is the capacity of a society to ensure the welfare of all its members, minimising disparities and avoiding polarisation. A cohesive society is a mutually supportive community of free individuals pursuing these common goals by democratic means”*. Artinya kohesi sosial adalah kapasitas suatu masyarakat untuk menjamin kesejahteraan semua anggotanya, meminimalkan kesenjangan dan menghindari polarisasi. Menurut Bagnall et al. (2017) polarisasi mengacu pada kondisi memihak yang menyebabkan munculnya beberapa identitas masyarakat (kita-mereka). Masyarakat yang kohesif adalah masyarakat yang saling mendukung antar individu yang mengejar tujuan bersama melalui cara-cara

demokratis. Dragolov, et al. dalam Moustakas (2023) membagi kohesi sosial menjadi tiga dimensi sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Dimensi dan Sub-dimensi Kohesi Sosial Menurut Dragolov, et al. dalam Moustakas (2023)

Dimensi	Sub-dimensi	Penjelasan
1	2	3
Hubungan sosial	Jaringan sosial	Jejaring sosial yang kuat dan tangguh
	Kepercayaan pada orang	Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada individu lain
	Penerimaan keberagaman	Menerima individu dengan latar belakang dan gaya hidup berbeda sebagai anggota masyarakat yang sama
Keterhubungan	Pengenalan	Individu merasa sangat terhubung dengan wilayah geografisnya dan mengenalinya
	Kepercayaan pada institusi	Individu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi politik
	Persepsi keadilan	Individu percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil di masyarakat
Kebaikan bersama	Solidaritas dan kebermanfaatan	Individu merasakan tanggung jawab dan kemauan untuk membantu orang lain
	Menghormati aturan sosial	Individu menghormati aturan dasar masyarakat
	Partisipasi masyarakat	Individu berpartisipasi dalam masyarakat dan kehidupan sipil serta politik

Sumber: *Encyclopedia Social Cohesion: Definitions, Causes and Consequences* by Moustakas (2023)

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada dimensi hubungan sosial. Menurut Max Weber dalam Mucha (2006) hubungan sosial adalah tindakan timbal balik oleh dua orang atau lebih, baik tindakan yang bersifat kooperatif maupun sebaliknya. Menurut United Nations hubungan sosial dicirikan oleh kualitas interaksi antara orang-orang dalam suatu masyarakat. Dilanjutkan hubungan sosial memiliki enam tahap baik positif maupun negatif:

1. Koeksistensi, yang muncul dengan toleransi terhadap perbedaan yaitu hubungan sosial berkisar pada dialog sipil.

2. Kolaborasi muncul dengan rasa keadilan sosio-ekonomi yang semakin luas, artinya hubungan sosial mengarah pada perencanaan pembangunan yang partisipatif.
3. Kohesi muncul dengan budaya perdamaian, yaitu hubungan sosial yang mendukung penemuan/penciptaan makna dan nilai bersama sambil menghormati dan bahkan merayakan keberagaman.
4. Fragmentasi, yang muncul dalam situasi pelecehan, konflik bersenjata, dan kehancuran sosial. Dalam hal ini hubungan sosial hancur (paling parah pada tingkat psikologis) sehingga menimbulkan penyembuhan.
5. Pengecualian, yang muncul ketika ada pengabaian atau penindasan. Dalam hal ini hubungan sosial bersifat asimetris sehingga memunculkan strategi inklusi yang membangun kapasitas swadaya dan penghidupan
6. Polarisasi, yang muncul ketika kelompok dapat melakukan mobilisasi. Dalam hal ini hubungan sosial bersifat bermusuhan hingga agresif (paling parah pada tingkat identitas agama/etnis) sehingga menimbulkan mediasi/rekonsiliasi.

Menurut Dragolov, et al. dalam Moustakas (2023) hubungan sosial masyarakat dibangun oleh jaringan sosial (kerja sama, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kehadiran dan memberi saran dalam pertemuan warga), kepercayaan pada orang (empati dan kehangatan), dan penerimaan keberagaman (latar belakang dan gaya hidup).

#### 2.2.4.1 Jaringan Sosial

Dalam Farisa, et al. (2019) jaringan sosial adalah jaringan antar manusia, sebagai faktor terpenting pembentuk komunitas. Putnam dalam Farisa, et al. (2019)



berpendapat jaringan sosial dengan unsur lainnya memberikan peningkatan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama. Farisa, et al. (2019) meneliti mengenai faktor-faktor pembentuk modal sosial masyarakat yang di antaranya memuat jaringan sosial dibentuk oleh indikator kerja sama (Narayan & Cassidy: 2001), partisipasi dalam kegiatan keagamaan (Grootaert, Narayan, Jones, & Woolcock: 2003), partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (Maulana: 2009), serta kehadiran dan memberi saran dalam pertemuan warga (Putnam: 1993). Menurut Purba (2013) kerja sama adalah pengkondisian dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sementara menurut Zainuddin dalam Muhtar, et al. (2022) kerja sama adalah sifat peduli terhadap orang atau pihak yang dilandasi prinsip saling percaya dan menghargai. Dalam kerja sama perlu diterapkan prinsip untuk mencapai kerja sama yang baik. Bob Sugeng Hadiwinata dalam Muhtar, et al. (2022) menyampaikan bahwa kerja sama yang baik perlu mengikuti prinsip *good governance* yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, seluruh masyarakat berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun diwakili lembaga kemasyarakatan yang sah.
2. Penegakan supremasi hukum, hukum harus ditegakkan secara adil dan menyeluruh.
3. Transparansi, seluruh informasi dapat diketahui oleh masyarakat.
4. Kepedulian terhadap *stakeholder*, seluruh lembaga pemangku kepentingan harus melayani masyarakat yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada konsensus, menjembatani segala kepentingan yang beragam dari masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.
6. Kesetaraan, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses kesejahteraannya.
7. Efektivitas dan efisiensi, segala proses pemerintahan dan lembaga menggunakan sumber daya dengan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Akuntabilitas, para pengambil keputusan bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan.
9. Visi strategis, pemimpin dan masyarakat memandang secara luas dalam tata pemerintahan serta pembangunan manusia yang baik.

Bentuk kerja sama dibedakan menjadi 4 macam menurut Gillin dan Gillin dalam Muhtar, et al. (2022) di antaranya:

1. Kerja sama spontan (*spontaneous cooperation*)

Kerja sama spontan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih secara tidak sengaja atau tidak ada perencanaan sebelumnya. Aspek-aspek yang mendukung terciptanya kerja sama spontan menurut Utomo & Minza dalam Muhtar, et al. (2022) yaitu latar belakang individu, norma personal, suasana hati, dan empati.

2. Kerja sama langsung (*directed cooperation*)

Kerja sama langsung adalah bentuk kerja sama yang dilaksanakan atas perintah atasan atau penguasa sebagai reaksi dari munculnya perintah atasan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Aspek pendukung kerja sama langsung

berdasarkan Utomo & Minza dalam Muhtar, et al. (2022) antar lain sistem informasi vertikal, sistem informasi lateral, dan sistem informasi manajer penghubung.

3. Kerja sama kontrak (*contractual cooperation*)

Kerja sama kontrak adalah bentuk kerja sama yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan dengan sebuah kontrak/perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Syarat kerja sama kontrak dikatakan sah menurut Jawat dalam Muhtar, et al. (2022) terdiri dari syarat subyektif (adanya kesepakatan dan kewenangan pihak-pihak) serta syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal).

4. Kerja sama tradisional (*traditional cooperation*)

Kerja sama tradisional adalah kerja sama yang termasuk dalam bagian sistem sosial di mana pelaksanaannya dengan cara tradisional dengan tradisi budaya yang terdiri dari nilai, norma kebudayaan yang dijadikan warisan leluhur sebagai kearifan lokal.

Ada pun manfaat kerja sama menurut Surminah dalam Muhtar, et al. (2022) sebagai berikut: (1) Kerja sama mendorong persaingan dalam mencapai tujuan serta peningkatan produktivitas; (2) Kerja sama mendorong bermacam upaya individu untuk bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien; (3) Kerja sama mendorong pembentukan sinergi yang kuat; (4) Kerja sama mendorong pembentukan hubungan harmonis serta melahirkan rasa kesetiakawanan; (5) Kerja sama mendorong praktik yang sehat dalam peningkatan semangat kelompok; (6) Kerja sama mendorong dalam partisipasi dalam menanggapi situasi dan kondisi lingkungannya.

Sementara menurut Davis dalam Herman (2019) partisipasi adalah pelibatan mental, pikiran, moral, dan perasaan di dalam kelompok untuk memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan bersama. Maulida (2023) menyampaikan bahwa secara umum, partisipasi mengacu pada keterlibatan atau keikutsertaan manusia pada kegiatan tertentu (baik sebagai individu maupun anggota organisasi/masyarakat). Sementara dalam arti sempit, partisipasi diartikan sebagai berandil dalam memberikan sumbangan baik berbentuk buah pikiran, tenaga, dana, bahan-bahan dan sebagainya. Dilanjutkan menurut Maulida (2023) bentuk partisipasi ada dua kelompok yaitu berwujud/nyata (memiliki bentuk) seperti uang, properti, tenaga kerja, dan bakat serta tidak berwujud/tidak nyata (bersifat abstrak) seperti partisipasi pemikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan keterlibatan representatif. Kegiatan keagamaan menurut Alfiah (2018) merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan agama, baik berupa kepercayaan maupun nilai-nilai kehidupan dan pedoman dalam menjalankan hubungan dengan Allah SWT serta lingkungan sekitar. Misalnya sholat berjamaah, ceramah, pengajian, perayaan hari besar agam, dan aktivitas lain yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dapat didefinisikan partisipasi dalam kegiatan keagamaan adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat/individu dalam kegiatan yang berhubungan dengan agama. Sementara kegiatan kemasyarakatan menurut Yulianto (2011) adalah kegiatan yang tidak memaksa maupun dipaksakan sehingga sifatnya fleksibel yang dilaksanakan dengan bebas berdasarkan kesadaran pentingnya kebersamaan di lingkungan masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan adalah keikutsertaan atau keterlibatan

masyarakat/individu dalam kegiatan yang bersifat tidak memaksa hanya berdasarkan kesadaran pentingnya kebersamaan di lingkungan tempat tinggalnya.

Pertemuan warga di masyarakat desa cenderung dilaksanakan melalui musyawarah. Menurut Hafidzi, et al. (2019) musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan persetujuan banyak orang sehingga mencapai keputusan yang bulat. Keputusan tidak harus didasarkan pada suara terbanyak, melainkan dibuat untuk mencapai kesepakatan dan mufakat. Sementara keputusan merupakan pengambilan solusi alternatif dengan sadar melalui analisis keputusan dari alternatif ini beserta konsekuensinya. Sehingga kehadiran serta pemberian saran dari peserta musyawarah menjadi sangat penting dalam mempengaruhi suatu keputusan yang mencapai kata mufakat. Keempat indikator jaringan sosial ini jika dilaksanakan dengan baik akan mencapai jaringan sosial yang kuat serta tangguh.

#### 2.2.4.2 Kepercayaan pada Orang

Kepercayaan pada orang merupakan salah satu tujuan yang harus dibentuk oleh pekerja sosial terhadap kliennya. Menurut Sukoco (2021: 148) “Ikatan kepercayaan antara orang yang ditolong dengan yang menolong harus ada sebelum orang mau menolong mengambil resiko ikut mengalami kesulitan, penderitaan, dan berjerih payah memecahkan masalah serta melakukan perubahan”. Ikatan kepercayaan dipengaruhi oleh kemampuan pekerja sosial untuk membangun relasi. Relasi pekerja sosial dipengaruhi oleh empati dan kehangatan. Menurut Sukoco (2021) empati adalah kemampuan dalam menempatkan diri di dalam perspektif orang lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan keakraban, sapaan, senyuman dengan

tulus, hingga penawaran nyata untuk membantu. Pernyataan Daniel Goleman dalam Angelyna & Liauw (2020) panca indera manusia sangat berhubungan dengan empati yang menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain. Ciri-ciri empati yang menciptakan kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman dalam Angelyna & Liauw (2020) sebagai berikut.

1. Empati kognitif, dengan cara mendengarkan orang lain secara baik. Seseorang perlu fokus mendengarkan serta memperhatikan permasalahan orang lain melalui cerita yang ia sampaikan.
2. Empati afektif, melalui penerimaan sudut pandang orang lain. Bahwa seseorang perlu melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain agar dapat menerima adanya perbedaan.
3. Empati belas kasih, dengan peka terhadap perasaan orang lain. Di mana seseorang mampu membaca serta mengetahui perasaan orang lain melalui bahasa tubuh verbal maupun non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, dan nada bicara.

Tingkatan empati dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Hoffman dalam Angelyna & Liauw (2020) yaitu:

1. Sosialisasi, melalui sosialisasi dan pelatihan seseorang akan dapat mendapatkan pengalaman emosi yang memicu berpikir serta memperhatikan orang lain sehingga muncul respons pro-sosial dan pengembangan rasa empati.
2. *Mood* dan *feeling*, seseorang lebih cepat berinteraksi maupun menghadapi orang lain dengan baik jika sedang dalam perasaan yang baik.

3. Proses belajar dan identifikasi, seseorang akan menunjukkan respons berbeda tergantung berbagai situasi sehingga bisa memaksimalkan proses belajar.
4. Situasi dan tempat, beberapa situasi mampu membuat manusia menumbuhkan empati dengan baik karena situasi dan tempat dengan suasana yang beragam.
5. Komunikasi dan bahasa, ini akan lebih mudah ditangkap seseorang sehingga empati dapat dirasakan dan tidak salah arti.
6. Pengasuhan, faktor lingkungan dari keluarga mempengaruhi cara manusia mengelola empatinya, keluarga dengan pengasuhan yang baik akan menumbuhkan empati yang baik pula begitu pun sebaliknya.

Penerapan empati dalam kehidupan manusia akan memberikan manfaat positif. Manfaat tersebut dijabarkan oleh Daniel Goleman dalam Angelyna & Liauw (2020) sebagai berikut: (1) mampu menyesuaikan diri dengan perbedaan karena tumbuh kesadaran bahwa manusia memiliki sudut pandang berbeda-beda; (2) Mendorong seseorang dalam membantu penderitaan orang lain karena merasa tidak nyaman melihat penderitaan tersebut sehingga mengurangi kemungkinan perilaku buruk terhadap orang lain; (3) mampu menilai orang berdasarkan kemampuan peka dan dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain.

Sedemikian Sukoco (2021) menjelaskan bahwa kehangatan merupakan sikap yang menunjukkan penerimaan dan tidak menghakimi. Najib dalam Putri (2019) memberikan pengertian penerimaan dan sikap tidak menghakimi berdasarkan delapan nilai pekerja sosial antara lain penerimaan, individualisasi, pengungkapan perasaan, sikap tidak menghakimi, obyektivitas, *self determination* (penentu nasib sendiri), kerahasiaan, dan akuntabilitas. Nilai penerimaan berarti

pekerja sosial menerima klien dengan memperlakukan mereka secara manusiawi, memberikan martabat dan harga diri, membantu menumbuhkan rasa percaya klien terhadap pekerja sosial melalui berbagai pendekatan, serta pekerja sosial menerima klien apa adanya terhadap kondisi klien baik kekurangan fisik maupun non- fisik. Sementara sikap tidak menghakimi berarti pekerja sosial tidak menghakimi klien dan menerima segala penyampaian klien, sehingga klien merasa mempunyai harkat martabat yang sama. Pelaksanaan indikator empati dan kehangatan yang positif dalam membangun aspek kepercayaan pada orang akan menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap individu lain.

#### 2.2.4.3 Penerimaan Keberagaman

Menurut Dragolov, et al. dalam Moustakas (2023), penerimaan keberagaman terdiri dari penerimaan latar belakang dan gaya hidup masyarakat. Menurut Miley et al. (2014: 35), "*Cultural identities powerfully influence how we view ourselves and how others view us. Race, ethnicity, culture, and socioeconomic and gender contexts can be stepping stones to success for the power elite; however, they may function as roadblocks for those who are oppressed*". Artinya, identitas budaya sangat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan bagaimana orang lain memandang kita. Ras, suku, budaya, dan sosial ekonomi serta gender dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan bagi elit kekuasaan namun, mereka mungkin berfungsi sebagai penghalang bagi mereka yang tertindas. Melalui pernyataan tersebut, ras, suku, budaya, sosial ekonomi, dan gender dapat dikatakan sebagai latar belakang masyarakat untuk bisa dipandang orang lain sebagaimana yang diinginkannya.



Menurut Miley et al. (2014), ras mengacu pada ciri-ciri fisik, dengan perhatian khusus pada warna kulit dan bentuk wajah. Suku atau etnik merupakan anggota kelompok yang berbagi atribut budaya yang sama seperti bahasa, keturunan, atau agama. Budaya menggambarkan fenomena manusia yang dihasilkan melalui hubungan berkelompok dengan manusia lain yang dapat diidentifikasi. Keunikan budaya berasal dari keanggotaan dalam berbudaya dengan kelompoknya seperti budaya yang terkait dengan gender, pekerjaan, klub dan organisasi, wilayah geografis, etnis, dan agama. Setiap kelompok memiliki keunikan budaya yang berbeda yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain karena hal tersebut dilihat sebagai keberagaman bukan perbedaan. Dalam Nurwati & Listari (2021) menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi dapat mencerminkan kedudukan seseorang dan pandangan orang lain terhadapnya. Sedemikian Aisyah Jannah dan Wardani dalam Nurwati & Listari (2021) status sosial ekonomi manusia berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang, dan rendah yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan gizi dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan. Bem dalam Miley et al. (2014) menyebutkan mengenai asumsi seksual yang biasa berkembang di masyarakat dan dijadikan sebagai pandangan dalam menilai individu antara lain androsentrisme (laki-laki adalah manusia, dan perempuan adalah manusia “lainnya”), polarisasi gender (laki-laki adalah maskulin, dan perempuan adalah feminin), dan esensialisme biologis (takdir biologis). Berdasarkan asumsi tersebut, gender berkaitan dengan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Gender bisa mempengaruhi realitas sosial dikarenakan pandangan lama di mana ada perbedaan

kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis laki-laki dan perempuan juga memiliki kemampuan yang berbeda sehingga hal ini mempengaruhi bagaimana antara laki-laki dan perempuan melakukan kehidupan sosialnya.

Gaya hidup menurut Kotler dalam Tarigan (2015) adalah pola hidup manusia melalui ekspresi dalam bentuk aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup dianggap mewakili individu manusia tersebut. Menurut Assael dalam Tarigan (2015) di mana gaya hidup ditentukan manusia melalui caranya menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang dianggap penting dalam lingkungan (minat), serta apa yang dipikirkan tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka (opini). Dijelaskan kembali menurut Khan dalam Zahra & Saryadi (2017), minat adalah kecenderungan prioritas serta preferensi dalam diri, opini adalah perasaan seseorang mengenai sebuah peristiwa, sedangkan aktivitas adalah suatu cara manusia menghabiskan waktunya. Mueller dalam Tarigan (2015) mendefinisikan 4 kelompok dalam memahami gaya hidup. Kelompok tersebut antara lain:

- a. Pendekatan psikolog perkembangan, bahwa tindakan seseorang disebabkan karena teknik, ekonomi dan politik, serta perubahan nilai.
- b. Pendekatan kuantitatif sosial struktur, pengukuran gaya hidup berdasarkan daftar total nilai konsumsi seseorang.
- c. Pendekatan kualitatif dunia kehidupan, memandang gaya hidup melalui lingkungan pergaulan.
- d. Pendekatan kelas, mempunyai pandangan bahwa gaya hidup sebagai budaya yang diciptakan untuk kepentingan struktur kelas.

Penerimaan keberagaman yang dibentuk berdasarkan indikator latar belakang dan gaya hidup akan membentuk hubungan sosial. Penerimaan individu yang memiliki perbedaan latar belakang dan gaya hidup dalam suatu anggota masyarakat yang sama akan membentuk hubungan sosial masyarakat yang kuat.

Menurut Friedkin dalam Norton & Haan (2013) meskipun biasanya masyarakat atau kelompok ditempatkan sebagai pusat analisis, kohesi sosial juga telah didefinisikan pada tingkat individu. Hal ini termasuk sikap keanggotaan individu (keinginan atau niat mereka untuk tetap berada dalam suatu kelompok, identifikasi atau kesetiaan mereka terhadap suatu kelompok, dan sikap lain mengenai kelompok atau anggotanya) dan perilaku keanggotaan individu (keputusan mereka untuk memutuskan, melemahkan, mempertahankan, atau memperkuat keanggotaan atau partisipasi mereka dalam suatu kelompok, kerentanan mereka terhadap pengaruh antarpribadi, dan indikator perilaku lainnya mengenai komitmen dan keterikatan pada kelompok). Jika individu sudah memiliki kohesi sosial yang kuat maka akan linier pada tingkat masyarakatnya. Tingkat kohesi sosial yang lebih besar berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan yang lebih besar.

### **2.2.5 Praktik Pekerjaan Sosial Makro**

Menurut Netting, et al. (2017: 1), “*Macro practice as professionally guided intervention(s) designed to bring about change in organizational, community, and/or policy arenas*”. Artinya praktik makro dalam pekerjaan sosial adalah intervensi profesional yang disusun untuk melakukan perubahan di bidang organisasi, masyarakat, dan/atau kebijakan. Ditegaskan kembali oleh Netting, et al.

(2017) bahwa organisasi adalah kumpulan individu yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat sering kali dicirikan sebagai ruang, orang, nilai-nilai bersama dan institusi, interaksi, distribusi kekuasaan, dan sistem sosial. Kebijakan merupakan pernyataan atau serangkaian tindakan yang diadopsi secara formal tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana hal itu akan terjadi.. Untuk dikatakan profesional, pekerja sosial harus menjalani pendidikan formal dengan menguasai tiga kerangka pekerjaan sosial yaitu kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Weil, Reisch, dan Ohmer dalam Netting, et al. (2017) mengidentifikasi empat pendekatan yang digunakan oleh agen perubahan untuk terlibat dalam praktik komunitas yaitu pengembangan masyarakat (*community development*), pengorganisasian masyarakat (*community organization*), perencanaan (*planning*), dan perubahan progresif (*progressive change*).

Tabel 2. 3 Pendekatan Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Pendekatan 1	Deskripsi 2
Pengembangan Masyarakat ( <i>Community Development</i> )	Pengembangan masyarakat adalah menghubungkan masyarakat dengan struktur yang ada untuk terlibat dalam aktivitas seperti pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, perbaikan lingkungan, dan pengembangan perumahan yang terjangkau (Staples, 2012). Jenis pekerjaan ini dapat mencakup pembangunan sosial dan ekonomi serta strategi pembangunan berkelanjutan (Weil, Reisch, & Ohmer, 2013).
Pengorganisasian Masyarakat ( <i>Community Organization</i> )	Pengorganisasian masyarakat didefinisikan dalam berbagai cara dan dapat digunakan untuk tujuan konservatif, liberal, dan tujuan radikal (Brady & O'Connor, 2014). Dalam pekerjaan sosial, melibatkan bekerja dengan banyak penduduk asli masyarakat dan menggunakan kekuatan mereka secara kuantitas untuk berpartisipasi secara kolektif dalam menciptakan perubahan sosial (Staples, 2012).
Perencanaan Masyarakat ( <i>Community Planning</i> )	Perencanaan masyarakat dapat mencakup pengembangan program, koordinasi dan evaluasi proses untuk merancang proyek, program, dan layanan. Fokus perencanaan mungkin adalah lingkungan setempat, negara bagian, wilayah, dan bahkan internasional (Weil, Reisch, & Ohmer, 2013).
Perubahan Progresif ( <i>Progressive Change</i> )	Perubahan progresif melibatkan upaya perubahan komunitas melalui aktivitas politik dan bahkan advokasi secara radikal (Almog-Bar & Schmid, 2014; Dudziak & Profit, 2012). Upaya ini mungkin melibatkan praktik kebijakan yang menargetkan perubahan legislatif, pembangunan koalisi, dan partisipasi dalam gerakan sosial, serta cakupannya dapat berkisar dari lokal hingga global (Weil, Reisch, & Ohmer, 2013).

Sumber: Buku *Social Work Macro Practice Sixth Edition* by Netting, et al. (2017)

Dalam melaksanakan intervensi pekerjaan sosial di aras makro diperlukan strategi dan taktik di dalamnya. Sedemikian Netting, et al. (2017) menyatakan bahwa strategi adalah upaya secara keseluruhan yang dirancang untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan diterima, sementara taktik adalah teknik dan perilaku spesifik yang digunakan dalam kaitannya dengan sistem target dan dirancang untuk memaksimalkan kemungkinan bahwa strategi tersebut akan berhasil dan diusulkan perubahan lanjutan. Strategi dan taktik pada praktik pekerjaan sosial makro sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Strategi dan Taktik Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Strategi 1	Taktik 2
<p><b>Kolaborasi (<i>collaboration</i>)</b> Sistem sasaran setuju (atau mudah diyakinkan untuk setuju) dengan sistem kegiatan bahwa perubahan diperlukan dan didukung alokasi sumber daya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi, digunakan ketika sistem kegiatan dan sistem sasaran bersedia bekerja sama.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi, mengacu pada aktivitas yang melibatkan anggota sistem klien dalam upaya perubahan.</li> <li>b. Pemberdayaan, mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan untuk membebaskan anggota sistem klien dari hambatan nyata atau yang dirasakan terhadap partisipasi.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Kampanye (<i>campaign</i>)</b> Sistem sasaran bersedia untuk berkomunikasi dengan sistem kegiatan, namun hanya terdapat sedikit kesepakatan akan pentingnya perubahan atau sistem sasaran mendukung perubahan tetapi tidak mengalokasikan sumber daya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pendidikan, melibatkan berbagai bentuk komunikasi dari anggota sistem kegiatan yang diarahkan kepada mereka yang ada dalam sistem sasaran.</li> <li>4. Persuasi, mengacu pada seni meyakinkan orang lain untuk menerima dan mendukung sudut pandang seseorang terhadap suatu permasalahan.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bergabung, diartikan sebagai meminimalkan tindakan menentang dengan memasukkan anggota sistem sasaran ke dalam sistem kegiatan.</li> <li>b. Melobi, menasar pengambil keputusan yang netral atau penentang perubahan.</li> </ol> </li> <li>1. Bantuan media massa, mengacu pada pemberitaan sesuatu ke media cetak dan elektronik dengan tujuan mempengaruhi opini publik</li> </ol>
<p><b>Kontes (<i>contest</i>)</b> Sistem sasaran menentang perubahan dan/atau alokasi sumber daya dan tidak terbuka untuk komunikasi lebih lanjut tentang alasan menentang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tawar-menawar dan negosiasi, mengacu pada situasi di mana sistem kegiatan dan sistem sasaran saling berhadapan dengan alasan sistem sasaran memberikan penolakan terhadap suatu usulan perubahan.</li> <li>7. Aksi kelompok besar atau komunitas, mengacu pada mempersiapkan, melatih, dan mengorganisasi sejumlah orang yang bersedia membentuk kelompok penekan dan mengadvokasi perubahan melalui berbagai bentuk tindakan seperti aksi mogok, interupsi, demo, boikot, dan taktik konfrontatif lainnya.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hukum (misalnya demonstrasi)</li> <li>b. Ilegal (misalnya, tindakan anarkis)</li> </ol> </li> <li>8. Gugatan aksi sosial, mengacu pada kasus-kasus di mana suatu kelompok menggugat karena dianggap ada pelanggaran hukum dan diharapkan mendapat putusan pengadilan yang berlaku untuk seluruh masyarakat.</li> </ol>

Sumber: Buku *Social Work Macro Practice Sixth Edition* by Netting, et al. (2017)

Morales & Sheafor dalam Sukoco (2021) mengartikan sumber sebagai segala sesuatu yang dipakai untuk pencapaian tujuan, pemecahan masalah, menghilangkan kesusahan, penyelesaian tugas-tugas kehidupan, serta perwujudan aspirasi dan nilai. Sumber terdiri dari benda berwujud (*tangible*), seperti uang, makanan, tempat tinggal, dan penitipan anak maupun sesuatu tidak berwujud (*intangible*), seperti pengetahuan, keberanian, harapan, cinta, dan status. Sumber diperlukan untuk pekerja sosial membantu memperbaiki keberfungsian sosial klien. Kegiatan yang dilaksanakan pekerja sosial dalam menemukan serta mengembangkan sumber menurut Sukoco (2021) yakni:

1. Pengembangan sistem sumber baru yang dibutuhkan.
2. Pembangunan relasi awal antara orang dengan sistem sumber dan antar berbagai sistem sumber.
3. Pemberian fasilitas interaksi antara individu di dalam sistem sumber.
4. Pemberian fasilitas interaksi secara terus menerus atau berkelanjutan di antara sistem sumber.
5. Membantu orang mengembangkan dan mendayagunakan sumber untuk menghadapi dan memecahkan masalah mereka.

Sementara sistem sumber menurut Allen Pincus & Anne Minahan dalam Sukoco (2021) diklasifikasikan menjadi tiga golongan yakni:

1. Sistem sumber informal atau alamiah (*informal or natural resource systems*)

Sistem sumber informal atau alamiah didapatkan dari keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang memiliki kesediaan membantu. Bantuan dari

sumber-sumber alamiah antara lain dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkret lainnya, seperti pinjam uang.

2. Sistem sumber formal (*formal resource systems*)

Sistem sumber formal adalah anggota di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan dalam rangka peningkatan minat anggota mereka. Sistem sumber membantu anggotanya untuk melakukan negosiasi serta memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

3. Sistem sumber kemasyarakatan (*societal resource system*)

Sistem sumber kemasyarakatan berupa rumah sakit, badan-badan sosial, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Orang yang kehidupannya berkaitan dengan sistem sumber kemasyarakatan antara lain sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program-program tenaga kerja, dan sebagainya. Orang yang kehidupannya berkaitan dengan badan-badan pemerintah dan pelayanan-pelayanan umum lainnya seperti kepolisian, tempat-tempat rekreasi, dan pelayanan perumahan.

Asumsi praktik pekerjaan sosial makro adalah faktor adanya masalah dan kebutuhan hanya akan bisa ditemukan dari individu, keluarga, atau kelompok. Dalam bekerja dengan masyarakat, pekerja sosial sering mendapatkan dilema etik dikarenakan penyelesaian masalah di tingkat makro merupakan masalah yang paling banyak dirasakan masyarakat dan berdampak pada perubahan jangka panjang. Namun, bukan berarti pekerja sosial menghiraukan masalah masyarakat minoritas namun fokus penyelesaian masalah pada tingkat makro adalah upaya

kolaboratif untuk penyelesaian masalah yang rumit dan penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Dubois dan Miley dalam Sukoco (2021), tiga fungsi pokok pekerjaan sosial adalah fungsi konsultasi untuk pemecahan masalah (*consultancy for problem solving*) dalam aras makro pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial (*planner*), fungsi manajemen sumber (*resource management*) dalam aras makro pekerja sosial berperan sebagai aktivis (*activist*), dan fungsi pendidikan (*education*) dalam aras makro pekerja sosial berperan sebagai penjangkau (*outreacher*).